

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini membahas tentang Implementasi kebijakan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) di SMA Swasta Rayon X (sepuluh) di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi untuk menguji implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Komunikasi

Proses komunikasi kebijakan implementasi kebijakan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) di SMA Swasta rayon X (sepuluh) di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang kurang dilakukan proses sosialisasi. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi terhadap Permendikbud Nomor 28 tahun 2014 sudah dilaksanakan tapi belum berjalan secara maksimal sesuai dengan teori George. C Edward III oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli serdang. Selanjutnya kejelasan informasi tentang isi Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 yang harus disampaikan kesasaran kebijakan masih belum bisa dipahami secara utuh oleh pelaksana kebijakan sehingga banyak guru yang kurang mengerti atau paham akan juknis dari Permendikbud tersebut.

Selain kejelasan informasi masalah konsistensi yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Konstensi staf pelaksana kebijakan dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kebijakan Permendikbud

kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Deli Serdang belum dilaksanakan secara rutin. Dalam arti sosialisasi kebijakan guru ini tidak diagendakan oleh pihak Dinas Pendidikan secara rutin, sehingga informasi yang diberikan kepada guru tidak berkelanjutan.

Dalam teori George C. Edwards III mengatakan bahwa dalam hal proses komunikasi, sebuah kebijakan yang diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya dan sebuah kebijakan juga harus memberikan kejelasan mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah sebuah kebijakan menjadi tidak konsisten, hal tersebut dikarenakan pejabat yang tidak konsisten dan menyebabkan kebingungan pada pihak pelaksana.

2. Proses Sumberdaya

Dalam implementasi berdasarkan jumlah pegawai kualifikasi akademik negeri kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang, secara kuantitas jumlah pelaksana kebijakan masih kurang memadai jika dibandingkan dengan beban kerja staf yang ada. Berdasarkan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa mayoritas staf belum memahami informasi yang memadai tentang kebijakan ini. Ketersediaan informasi di lingkungan pelaksana kebijakan masih kurang memadai. Untuk itu dibutuhkan keaktifan untuk mengakses informasi tersebut melalui media internet melalui *website* oleh Guru Bukan pegawai Negeri Sipil yang sudah ditentukan baik melalui tingkat kabupaten maupun tingkat nasional.

Aspek lain dari sumberdaya adalah kewenangan. Kewenangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Deli Serdang hanya sebatas

menyerahkan atau mendistribusikan SK *Inpassing* kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai namun dalam hal keuangan masih belum dianggarkan di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan teori George C. Edwards III implementasi harus ditransmisikan secara akurat jelas dan konsisten. Namun, jika para implementor kekurangan sumberdaya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi mungkin akan berjalan menjadi tidak efektif. Baik dari segi staf yang tidak cukup dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, informasi dalam melakukan sebuah kebijakan yang kurang dipahami, kewenangan yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan fasilitas yang tidak cukup dalam mewujudkan sebuah kebijakan. Keempat faktor tersebut harus saling mendukung satu dengan lainnya agar sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik dan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru dan meningkat keberhasilan pada bidang pendidikan.

3. Proses Disposisi

Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara umum bentuk disposisi yang sudah dilakukan antara lain informasi yang disampaikan dari Kepala seksi kepada pegawai dinas dalam hal pemberian informasi. Walaupun dalam hal ini, informasi yang diberikan belum sepenuhnya dikuasai oleh staf atau pegawai. Sikap, pemahaman dan komitmen pelaksana terhadap implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 di Kabupaten

Deli Serdang, perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan, sosialisasi maupun dalam bentuk himbauan. Bagi para pegawai atau staf guna untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang.

Disposisi dalam teori George C. Edwards III adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang terbentuk dari pengetahuan atau pengalaman. Jika pengetahuan atau pengalaman terhadap sesuatu itu buruk maka akan berakibat buruk tapi jika sebaliknya maka akan terjadi sikap simpati yang akan berakibat kepada dukungan positif.

4. Proses Struktur Birokrasi

Dalam proses implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang, pihak Dinas Pendidikan sudah memiliki struktur organisasi yang jelas. Terkait dengan koordinasi internal dalam pelaksanaan kebijakan sudah dapat berjalan dengan baik. Tetapi koordinasi eksternal antara Dinas Pendidikan dengan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil masih berjalan kurang efektif dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil masih kurang diberdayakan. Hal ini dapat terlihat dilapangan pada saat peneliti melakukan pengamatan, dimana ketika ada guru yang bertanya pada bagian sertifikasi di Dinas Pendidikan mengenai proses *Inpassing* pegawai langsung mengarahkan pada bagian kurikulum. Ini membuktikan bahwa belum jelasnya struktur birokrasi didalam pembagian tugas di Dinas Pendidikan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti selanjutnya mengajukan beberapa saran untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang: Jika ada Pejabat atau Pegawai yang ada dilingkungan setempat mengikuti Bimtek ataupun Pelatihan ditingkat Nasional (pusat), maupun tingkat Provinsi hendaknya mereka diminta untuk menjelaskan apa isi dari pelatihan tersebut. Sehingga jikalau hal tersebut harus segera ditindaklanjuti atau dianggap penting agar segera dapat dibuatkan program kerja dalam waktu yang dekat dan dapat dibuatkan anggarannya. Dan membuat SOP yang jelas, baik secara tertulis maupun secara media agar informasi mengenai *inpassing* dapat diketahui oleh seluruh guru-guru. Karena program *inpassing* tersebut berguna untuk kesejahteraan guru atau dalam hal pengembangan kompetensi guru hal itu menjadi sangat penting.
2. Kepada Yayasan: Ketua yayasan hendaknya selalu memperbaharui SK bertugas guru yang nama guru-gurunya diusulkan oleh kepala sekolah setiap tahunnya, dan mendukung setiap program pemerintah baik tingkat I maupun dari tingkat pusat, memperhatikan kesejahteraan guru karena hal tersebut akan mempengaruhi kinerja guru dalam mengajar dan mendidik para peserta didik dan membuat pelatihan terhadap guru guru.
3. Kepada Kepala Sekolah: Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap guru dalam mendapatkan informasi yang berguna bagi pekerjaan guru tersebut, mendukung setiap usaha guru dalam meningkatkan kompetensinya sehingga guru dalam bekerja bisa bersikap profesional dalam bekerja.

4. Kepada Guru: Guru harus mampu mengupgrade kemampuannya dalam hal kemampuan teknologi dan informasi., guru juga diharapkan memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengajar peserta didik, karena tunjangan yang selama ini sudah diberikan pemerintah sangat memadai dalam mengembangkan potensi yang ada didalam diri masing-masing guru dan yang terpenting adalah guru harus mampu mengajar dan membimbing peserta didik dengan ketulusan dan keikhlasan hati, pelatihan-pelatihan, studi banding dan mengikuti seminar.
5. Kepada Peneliti: Agar dapat melakukan penelitian kebijakan lebih dalam lagi, khususnya dalam kebijakan pendidikan dengan memaksimalkan segala data yang ada. Temuan lapangan yang didapat oleh peneliti agar dapat disampaikan hasilnya sehingga diharapkan dengan temuan tersebut akan dilakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik lagi.

